



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memperbaiki program perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan inklusif, perlu disusun acuan bagi lintas pelaku dan lintas sektor dalam pengoordinasian pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Salatiga, perlu menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Salatiga.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
10. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi lintas pelaku dan lintas sektor dalam pengoordinasian pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

- SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai ruang lingkup:
- a. strategi utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam RPJMD;
 - c. analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan untuk menentukan prioritas perencanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. analisis penganggaran program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan agar menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. analisa dan mekanisme pengendalian program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Sistematika SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
 - BAB III KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN
 - BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - BAB V ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI DAN SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - BAB VII PENUTUP
- (2) Dokumen SPKD sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Mei 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
Latar Belakang	I-1
Landasan Hukum	I-2
Maksud dan Tujuan	I-3
Ruang Lingkup.....	I-4
Sistematika.....	I-5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	II-1
2.1. Tingkat Kemiskinan	II-1
2.2. Garis Kemiskinan	II-4
2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	II-6
2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	II-9
2.5. Komposisi Jumlah Individu Berdasarkan Klasifikasi Kemiskinan Tingkat Kecamatan di Kota Salatiga	II-12
BAB III KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN	III-1
3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional	III-1
3.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	III-6
BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	IV-1
4.1. Perkembangan Anggaran	IV-1
4.2. Distribusi Anggaran	IV-3
4.3. Program Penunjang Pengentasan Kemiskinan	IV-4
BAB V ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI DAN SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	V-1
5.1. Kelompok Program Klaster 1: Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	V-1
5.2. Kelompok Program Klaster 2: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	V-29

5.3. Kelompok Program Klaster 3: Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan KecilV-38

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN VI-1

6.1. Program, Kegiatan dan Indikator Penanggulangan Kemiskinan VI-1

6.2. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan VI-8

6.3. Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.....VI-12

BAB VII PENUTUPVII-1

Capaian indikator Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

1. Klaster 1 : Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Wajib Belajar 9 tahun	Bantuan pendidikan bagi siswa dari RTS (murid)	murid	4 kec	Disdikpora	2.382	2.501	2.739	2.977	3.215
2	Program Pendidikan Menengah	Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SLTA/ sederajat dari keluarga miskin (APBD) (%) Pemberian Bea Siswa retrieval untuk Anak Putus Sekolah setingkat SLTA (APBD)	murid	4 kec	Disdikpora	810	850	890	930	970
3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional (KF) Penyediaan buku perpustakaan dan alat peraga edukasi (APE) bagi Kejar Paket A dan B Penyelenggaraan Paket C/ setara SMU/ sederajat Pengembangan pendidikan kecakapan hidup di	Kelurahan Paket Kelurahan	4 kec 4 kec 4 kec	Disdikpora Disdikpora Disdikpora	1 kel 2 paket 2 kel	1 kel 2 paket 2 kel	1 kel 4 paket 2 kel	1 kel 5 paket 2 kel	1 kel 6 paket 1 kel
			Kelurahan	4 kec	Disdikpora	2	4	6	8	12
						kelurahan	kelurahan	kelurahan	kelurahan	kelurahan

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	SKBM Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya (%) (Dana APBD)	%	4 kec	Dinkes dan Puskesmas/RSUD	90	92	94	98	100
5	Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan makanan	Peningkatan pengawasan obat dan makanan (pengawasan kantin sekolah dan jajanan anak sekolah)	Sekolah	Sekolah di 4 kecamatan	Dinkes, Bapermas, PKB dan KP dan Dindikpora	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	15 sekolah
		Peningkatan penyuluhan dan pengawasan Bahan Tambahan Pangan (BTP)	Kelurahan	4 kec	Dinkes, PKB Bapermas, dan KP	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel	5 kel
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan penyuluhan tentang kesadaran Pola Gizi Seimbang dan Kesehatan Masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui PKK dan Posyandu	Kecamatan	4 kec	Dinkes dan Dindikpora	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Kecamatan	4 kec	Dinkes, PKB Bapermas, PKB dan KP dan Dindikpora Dinkes, PKB Bapermas, dan KP	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
8.	Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin	Kegiatan bersama Jum'at Bersih di kelurahan Pemberantasan penyakit menular Peningkatan kesehatan Ibu dan Balita bagi RTM	Kecamatan	4 kec	Dinkes, Bapermas, PKB dan KP	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec
9	Program perbaikan Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk	Kecamatan	4 kec	Dinkes	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec
10	Program Peningkatan Gizi Anak Balita	Pemberian Imunisasi komplitt gratis kepada balita keluarga miskin (%) Penyuluhan kesehatan anak Balita	Kecamatan	4 kec	Dinkes	98	98	100	100	100
11	Program Peningkatan Sarpras RSUD dan RS paru	Pembangunan ruang kelas III di RSUD Pengadaan alat-alat kesehatan untuk RSUD	%	RSUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	%	RSUD	RSUD	100%	100%	100%	100%	100%
13	Program KB	Pemberian bantuan	%	4 kec	Dinkes	100%	100%	100%	100%	100%

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
		Kontrasepsi mantap gratis bagi keluarga miskin								
		Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Sekolah	Sekolah terpilih	Dinkes	5	10	15	25	30
14	Program Penyediaan Air Bersih	Pembangunan sumur/ sumber air tanah	Unit	Kel terpilih	DPU	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan di pemukiman padat penduduk	TPS	Kawasan pemukiman padat	DPU	5 TPS	5 TPS	5 TPS	5 TPS	5 TPS
16	Program Pengembangan sarpras air bersih	Pembangunan sarpras bagi RTM di wilayah padat penduduk (unit)	Unit	Kawasan pemukiman padat	DPU	10	12	14	16	18
17	Program Pengemangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kelurahan	7 kelurahan miskin	DPU	7 kel	7	7	7	7
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Unit	Kawasan pemukiman padat	DPU	5	5	5	5	5 unit
18	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTH) (APBD)	Rumah		Bapemasper KB dan KP; DPU	12	12	14	14	20
		Pembangunan jamban jamak bagi	Unit	Kawasan pemukiman	Bapemasper KB dan KP	5	5	5	5	5

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
		RTM (unit)		padat						
		Pembangunan prasarana dan sarana air limbah di permukiman padat	Unit	Kawasan permukiman padat	Bapemasper KB dan KP	7	7	7	7	7
19	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Bantuan prasarana dan sarana dasar perumahan (Jamban, air bersih, air limbah) berbasis masyarakat (kel)	Kelurahan	Kawasan permukiman padat	Bapemasper KB dan KP	3	3	4	4	4 kel
20	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesra	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kelurahan	4 kec	Bapemasper KB dan KP	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
21	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo	Unit	4 kec	Dinsosnakertrans	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22	Program Rehabilitasi Kesejahteraan daerah	Santunan Kematian Keluarga Miskin	Kasus	4 kec	Setda	kasus	-	-	-	-
		Bantuan sosial penyandang cacat, terlantar	Kelurahan	4 kec	Setda	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
		Bingkisan bagi Kaum Dhuafa	Kelurahan	4 kec	Setda	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
		Bantuan beras miskin daerah		4 kec	Setda		100	100	100	100

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
23	Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS		4 kec	Bapermasper KB dan KP	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel

2. Klaster II : Program Pemberdayaan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Unit	4 kec	DPU dan KLH	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Fasilitasi Bantuan Sosial RTM Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di	Kecamatan	Seluruh kelurahan	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
			Kelurahan	Kelurahan terpilih	Dinsosnakertrans	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
			Kecamatan	Kelurahan terpilih	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
3	Program pelatihan kader kesehatan	Kelurahan								
		Fasilitasi TMMD Sengkuyung		Kelurahan terpilih	Bappeda	Kel terpilih	Kel terpilih	Kel terpilih	Kel terpilih	Kel terpilih
4	Program Peningkatan ketahanan pangan daerah	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan di tingkat kelurahan	Kecamatan	4 kec	Dinkes	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan supply pangan	Buku	Kota Salatiga	Bapermasper, KB dan KP	1	1	1	1	1
		Pengembangan cadangan pangan daerah								
		Penyuluhan peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kecamatan	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kecamatan	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Penyuluhan Pola Gizi Seimbang dan Panganekaragaman Pangan (non Beras dan Terigu)	Kecamatan	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Penyuluhan dan Kampanye Mengurangi Konsumsi Beras (<90Kg/perkapita/ tahun) dan pengakeragaman bahan pangan pokok.	Kecamatan	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Peningkatan	PKK,	4 kec	Dispartan	5 PKK	5 PKK	5 PKK	5 PKK	5 PKK

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
		Gerakanan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	sekolah			dan 5 Sekolah	dan 5 Sekolah	dan 5 Sekolah	dan 5 Sekolah	dan 5 Sekolah
5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kecamatan	4 kec	Dispartan	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Kecamatan	4 kec	Dispartan	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
6	Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana teknologi pertanian/perkebunan	Kelompok	4 kec	Dispartan	2 kel tani	2 kel tani	2 kel tani	2 kel tani	2 kel tani
7	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga petani	Kelompok	4 kec	Dispartan	4 Poktan	4 Poktan	4 Poktan	4 Poktan	4 Poktan
		Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan	Kecamatan	4 kec	Dispartan	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
8	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	Kecamatan	4 kec	Dispartan	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
		Pengembangan pemasaran hasil produksi perikanan	Kecamatan	4 kec	Dispartan	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec
9	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Blmtek penyuluh dan pendamping bagi usaha pertanian/perkebunan	Kelurahan	4 kec	Dispartan	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel
10	Program pencegahan dan penanggulangan	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit	Kelurahan	4 kec	Dispartan	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
	penyakit ternak	ternak menular Pengadaan sarpras lab. Peternakan Keswan		Kota Salatiga	Dispartan	-	-	-	-	-
11	Program Pengembangan budidaya perikanan	Pendampingan dan bantuan usaha bagi kelompok tani pembudidaya ikan . Peningkatan produksi perikanan budidaya	Kelurahan	4 kec	Dispartan	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel
		Pembinaan pengembangan perikanan budidaya	Kelompok	4 kec	Dispartan	Kel sentra perikanan 4 kec	Kel sentra perikanan 4 kec	Kel sentra perikanan 4 kec	Kel sentra perikanan 4 kec	Kel sentra perikanan 4 kec
12	Program pengembangan perumahan	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan berbasis masyarakat (KSP) Pembangunan sarpras Rumah Sehat Sederhana (RSS) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu	Kelurahan	4 kec	Bapermas	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan
			Unit	4 kec	DPU	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
13	Program Lingkungan Sehat perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pemukiman berbasis masyarakat	Unit	4 kec	DPU dan bapermas	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
14	Bantuan Khusus	Pengembangan FEDEP	Kegiatan	FEDEP	Bappeda	1	1	1	1	1

3. Klaster III : Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan pelatihan dan pembinaan klaster UMKM	Kel sentra perikanan	4 kec	Disperindakop dan UKM	Klaster terpilih	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan	Kel sentra perikanan
		Peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Kelurahan	4 kec	Disperindakop dan UKM	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
		Fasilitasi pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis	Kelurahan	4 kec	Disperindakop dan UKM	2 kel	2 kel	2 kel	2 kel	2 kel
2	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Koperasi	4 kec	Disperindakop dan UKM	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif
		Rintisan penerapan teknologi sederhana (tepat guna)	Koperasi	4 kec	Disperindakop dan UKM	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif
		Pengembangan dan pelayanan teknologi sederhana (DBHCT)	Unit	4 kec	Disperindakop dan UKM	2 unit/percontohan	2 unit/percontohan	2 unit/percontohan	2 unit/percontohan	2 unit/percontohan
3	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Pembinaan kemampuan teknologi Industri	Kelurahan	4 kec	Disperindakop dan UKM	2 kel	2 kel	2 kel	2 kel	2 kel
		Fasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha UMKM	Kelompok	4 kec	Disperindakop dan UKM	2 Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan
		Fasilitasi bagi UMKM dalam peningkatan pemanfaatan bahan	Kelompok	4 kec	Disperindakop dan UKM	Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan	Kelompok binaan

No	PROGRAM	KEGIATAN	Satuan	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran						
						2012	2013	2014	2015	2016		
4	Program Penataan dan Pemberdayaan PKL	baku lokal										
		Promosi dan fasilitasi produk UMKM	Kegiatan	Kota Salatiga	Disperindakop dan UKM	1	1	1	1	1		
4	Program Penataan dan Pemberdayaan PKL	Fasilitasi dan pemberian ijin usaha bagi UMKM dan pedagang asongan	Orang	4 kec	Disperindakop dan UKM	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang		
		Fasilitasi bantuan dan permodalan usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan	Orang	4 kec	Disperindakop dan UKM	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang		
5	Program penataan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan	Penataan dan pembinaan PKL dan asongan	Kecamatan	4 kec	Disperindakop dan UKM	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec		
		Pemberian bantuan modal bagi peningkatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED SP)	Kecamatan	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec		
5	Program penataan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan	Pemberian bantuan dan permodalan usaha bagi Kelompok Simpan Pinjam (dikelola Perempuan)	Orang	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang		
		Pembinaan dan pengembangan BKK di kecamatan	Kecamatan	4 kec	Disperindakop dan UKM	4	4	4	4	4		
5	Program penataan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan	Fasilitasi dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan (LED) (dikelola PKK)	LED	4 kec	Bapermasper, KB dan KP	LED aktif	LED aktif	LED aktif	LED aktif	LED aktif		

4. Klaster IV : Program – Pogram Pro Rakyat (Dipertuas)

No	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	LOKASI	SKPD Penanggung Jawab	Jumlah Sasaran				
						2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Pembinaan keterampilan pencari kerja	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pemberian bantuan permodalan usaha dan peralatan kerja bagi perintisan usaha	Orang	4 kec	Dinsosnakertrans	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesra	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dari keluarga miskin	Kelurahan	4 kec	Dinsosnakertrans	2 kel	2 kel	3 kel	3 kel	3 kel
3	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma	Pelatihan keterampilan dan perintisan usaha bagi penyndng cacat tubuh	Kelurahan	4 kec	Dinsosnakertrans	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel
4	Program pembinaan anak terlantar	Pemberian bantuan peralatan penunjang bagi penyndng cacat	Orang	4 kec	Dinsosnakertrans	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
5	Program Pembinaan eks penyandang PKMS	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar	Orang	4 kec	Dinsosnakertrans	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang	20 orang
6	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pelatihan keterampilan dan perintisan usaha bagi eks PMKS Fasilitasi penyediaan listrik bagi RTM di tujuh (7) kelurahan dengan RTM tinggi	Rumah tangga	7 kel	Setda dan PLN	10 RT	10 RT	10 RT	20 RT	20 RT

BAB VII P E N U T U P

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disebut SPKD Kota Salatiga merupakan arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat terpadu, terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multi sektor (*cross cutting issues*). Dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan empat (4) klaster sebagaimana arahan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan nasional, yaitu kebijakan yang dituangkan dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Strategi Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait dengan pencapaian target-target *Millenium Development Goal's (MDG's)* dan Kepres No. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.

Hasil penyusunan SPKD Kota Salatiga ini dapat dilaksanakan apabila diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahun, yaitu :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga dan
3. Rencana Kerja (Renja) SKPD pengampu urusan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan diantara SKPD pengampu urusan. Hal ini penting mengingat masalah kemiskinan bersifat kompleks dan saling *overlapping* satu dengan lainnya, terutama bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi serta swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara operasional memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat, kalangan dunia usaha dan perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran kelembagaan dalam masyarakat sangat penting dan bersifat strategis terutama dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi hasil penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi maka akan diketahui tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana.

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO